



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja maskro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Manusi	71,3	72,27	1,36%
2.	Angka Kemiskinan (%)	14,9	12,88	-13,557%
3.	Angka Pengangguran (%)	2,58	2,13	-17,442%
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,51	4,94	9,534%
5.	Pendapatan Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	132,95	142,14	6,912%
6.	Ketimpangan pendapatan (poin)	0,310	0	Data tahun 2024 belum rilis

Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2024



2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja makro yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib terkait pelayanan dasar mencakup urusan pemerintahan sebagai berikut :

1). Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2024 berdasarkan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	74.45 %
2.	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 – 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	115.72 %
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	87.80 %
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.34 %

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja urusan pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 sebesar Rp. 917.164.563.089,- dengan Program sebagai berikut :



No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/kota			
2.	Program pengelolaan pendidikan			
3.	Program pengelolaan keuangan daerah			
	Total			

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah terbatasnya Anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan.

2). Urusan Kesehatan

Capaian kinerja urusan Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2024 berdasarkan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Outcome

No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
1.	Rasio Daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,85 %
2.	Jumlah Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten Yang terakreditasi	100 %
3.	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	92,00 %
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	92,50 %
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95,53 %
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	76,30 %



No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
7.	Persentase anak usia mendapat pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,63 %
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,10 %
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	96,97 %
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapat kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,74 %
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	99,86 %
13.	Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	105,77 %
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	113,95 %

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja urusan Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 sebesar Rp. 368.362.774.703,- dengan Program sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota			
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan			



No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sub Kegiatan fisik sudah 100% tapi realisasi keuangan dibayarkan pada tahun 2025 dikarenakan kas kosong.
2. Kebijakan Pencairan Anggaran Transport Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kecamatan menggunakan Literisasi yang sebelumnya menggunakan Transport Per orang per Kecamatan
3. Transport peserta pertemuan sulit untuk di buktikan dengan Nota Travel maupun Nota Pembelian BBM
4. Pelatihan kesehatan wajib dilaksanakan di Bapelkes, dan target realisasi BLUD Bapelkes Prov.Sumsel sudah terpenuhi sehingga tidak bisa lagi menerima pembayaran/setor biaya pelatihan.



3). Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2024 berdasarkan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	4,47%
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastuktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten	0 % Aspek Geografis Kab. Muba tidak mempunyai pantai
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	67,73%
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	94,96%
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83,67%
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	61,16%
8.	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	44,83%



No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 sebesar Rp. 595.942.547.879,- dengan Program sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota			
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			
3.	Program Penyelenggaraan Jalan			
4.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi			
5.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			
6.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
	Total			



C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Dampak Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan di Kabupaten Musi Banyuasin terhadap capaian kondisi jalan mantap belum optimal dikarenakan masih banyak kegiatan/paket pembangunan/rehabilitasi jalan yang dilaksanakan di luar ruas-ruas jalan kabupaten yang tercantum dalam Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 92/KPTS-DPUPR/2023 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten. Hal ini mengakibatkan masih rendahnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang).
2. Konektivitas jalan antar kecamatan/desa dan jalan poros dalam kecamatan/desa perlu mendapatkan perhatian lebih dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan lingkungan yang lebih aman. Hal ini sering terkendala dengan kemampuan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
3. Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani masih cukup rendah, sehingga jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasi dan pelihara masih perlu ditingkatkan.
4. Tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin masih kurang



sehingga perlu pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga operator/teknisi/analisis yang lebih masif.

4). Urusan Permukiman Rakyat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Permukiman Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2024 berdasarkan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100 %
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	7,88 %
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	18,30 %
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	12,45 %



B. Realisasi Belanja Urusan Permukiman Rakyat

Realisasi belanja urusan Permukiman Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 sebesar Rp. 78.153.437.804,- dengan Program sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1.	Program Pengembangan Perumahan			
2.	Program Kawasan Permukiman			
3.	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh			
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu)			
5.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya			
	Total.....			

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Permukiman Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya indikator penghambat mendapatkan APBN disebabkan kurangnya form maupun baseline numerik kawasan kumuh;
2. Kegiatan yang dilaksanakan cenderung tidak line/overlay yang sesuai dengan Perbub Kawasan kumuh;
3. Kondisi /kultur lapangan tidak sesuai dan mengalami kendala;



4. Keakuratan data penerima bantuan badah rumah, relokasi;
5. Pertumbuhan penduduk yang cepat;
6. Untuk kegiatan relokasi yaitu penduduk yang terkena relokasi tidak mau pindah;
7. Banyaknya perumahan yang terlantar ditinggalkan pengembang sehingga OPD sulit melaksanakan hibah psu perumahan.

5). **Urusan Trantibumlinmas**

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2024 berdasarkan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100%
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100 %



B. Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas

Realisasi belanja urusan Permukiman Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 sebesar Rp. 10.606.652.605,- dengan Program sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
2.	Program Penanggulangan Bencana			
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
	Total.....			

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

1. Titik hotpsot tempat terjadinya kebakaran hutan, kebun dan lahan sulit untuk dijangkau dengan menggunakan kendaraan/darat;
2. Masih minimnya pengetahuan Masyarakat di wilayah rawan bencana tentang bahaya



karhutbunlah dan bahaya ancaman bencana alam lainnya;

3. Kebiasaan/ perilaku Masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar sehingga menyebabkan terjadinya karhutbunlah, dan kebiasaan warga yang tinggal dibantaran Sungai untuk mandi dan aktivitas lainnya di Sungai;
4. Dana Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia untuk Pembangunan jembatan di Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Sebesar Rp. 7.507.176.000,- baru ditransfer ke rekening daerah pada tanggal 31 Desember 2024 pukul ± 21.00 Wib.

6). Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2024 berdasarkan indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	75,03 %
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	58,11 %



B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja urusan Permukiman Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 sebesar Rp. 45.521.996.506,- dengan Program sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota			
	1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	2 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd			
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn			
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
	2 Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi			
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1 Penyediaan Komponen Instalasi			



NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
	Listrik/penerangan Bangunan Kantor			
	2 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor			
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
	5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan			
	6 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan			
	7 Penyediaan Bahan/material			
	8 Fasilitasi Kunjungan Tamu			
	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd			
	10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd			
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan			
	2 Pengadaan Mebel			
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber			



NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
	Daya Air Dan Listrik			
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan			
	2 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya			
	3 Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya			
2	Program Pemberdayaan Sosial			
	1 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (kat)			
	1 Peningkatan Kapasitas Dan Pendampingan Kat			
	2 Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/kota			
	1 Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang			



NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/kota			
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota			
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/kota			
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota			
	<i>1). Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota</i>			
	<i>2). Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (P-APBD)</i>			
	<i>3). Bantuan Tunai untuk Kebangkitan Ekonomi Keluarga (Bantuan UBAK) (P-APBD)</i>			
	<i>4). Bantuan Sosial Tunai Kematian (P-APBD)</i>			



NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
	4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota			
	5 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (lk3)			
3	Program Rehabilitasi Sosial			
	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial			
	1 Penyediaan Alat Bantu			
	2 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial			
	3 Pemberian Layanan Kedaruratan			
	1. Pemberian Layanan Kedaruratan (P-APBD)			
	2. Bantuan Sosial Berupa Uang Kepada Masyarakat (P-APBD)			
	Pemberian Layanan Rujukan			



NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya Bukan Korban Hiv/aids Dan Napza Di Luar Panti Sosial			
1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial			
2	Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/kota			
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial			
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota			
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota			
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
	1). Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
	2). Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat (P-APBD)			
5	Program Penanganan Bencana			
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap			



NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
	Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota			
	1 Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			
	Total			

C. Permasalahan yang dihadapi

Persentase anggaran Dinas Sosial secara keseluruhan hanya sebesar 54,33% dari total anggaran sebesar Rp. 78.258.993.052,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.521.996.506,00. Hal ini disebabkan karena sampai dengan per 31 Desember 2024 ada beberapa anggaran pada bantuan sosial yang seharusnya tuntas dan anggarannya terserap, tapi masih ada anggaran bantuan sosial yang tidak terserap seperti:

- Dari 45 Bantuan KUBE, yang bisa dicairkan hanya 39 KUBE saja, dan ada 6 KUBE Tidak dapat dicairkan karena keuangan daerah tidak memungkinkan.
- Dari 37 KPM Bantu Umak hanya cair 2 KPM saja, dan 35 KPM Tidak dapat dicairkan karena keuangan daerah tidak memungkinkan.
- 163 unit RTLH tersebut terdiri yang dianggarkan, hanya 80 unit sudah selesai dibangun, 10 unit masih sudah dibangun tapi menjadi hutang ditahun 2025, dan 73 unit



bantuan RS RTLH tidak dapat dilaksanakan di cairkan keuangannya karena keuangan daerah tidak memungkinkan.

- Anggaran Bantu Umak sebanyak 17.493 orang hanya terserap untuk desil 1 saja sebanyak 9.774 orang, selebihnya sebanyak 7.719 orang di Desil 2 tidak dapat tersalur karena keuangan daerah tidak memungkinkan.
- Terkait Katogeri Indeks Pencapaian SPM Dinas Sosial sebesar 71,65% untuk 5 Kategori SPM 4 dengan 13 indikator pelayanan di setiap kategori sampai dengan Pelaporan SPM TW 4 bulan Desember 2024 dapat kami sampaikan, bahwa ada beberapa kegiatan yang memang tidak memiliki anggaran khusus terkaitan pelayanan SPM tersebut dan kurangnya anggaran dalam pelaksanaan SPM.

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun sebelumnya

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2022 mendapatkan skor 2,9606 dengan status Kinerja Sedang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2023. Sedangkan hasil penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2023 sampai dengan saat ini belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri RI.



2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 mendapatkan Opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** yang dimuat dalam Hasil Pemeriksaan Nomor 23.A/LHP/XVIII.PLG/04/ 2023 tanggal 13 April 2023.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin Unaudited Tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 3.754.951.995.772,66 dan realisasi belanja daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 mencapai Rp. 3.811.674.048.170,23.

Secara rinci, rincian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :



Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4.1.01	Pajak Daerah			
4.1.02	Retribusi Daerah			
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah			
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah			
4.3.01	Pendapatan Hibah			
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
JUMLAH PENDAPATAN				



Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1.01	Belanja Pegawai			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			
5.1.03	Belanja Bunga			
5.1.05	Belanja Hibah			
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial			
5.2.01	Belanja Modal Tanah			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi			



Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga			
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan			
JUMLAH BELANJA				



5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 931/KPTS-BAPPEDA/2024 Tentang Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

NO.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	MUBA SURVEI SOLUSI VALIDASI DATA	Aplikasi Muba Survei sangat penting dalam mengatasi masalah kualitas data yang selama ini menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.
2.	RSUD Sekayu	BAPER AYU (Bidang Pelayanan Keperawatan RSUD Sekayu)	Aplikasi BAPER-AYU adalah mempermudah mengakses data, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan pengetahuan, meminimalisir kesalahan administratif, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berbasis digital, meminimalisasi penggunaan kertas dan mendukung efisiensi operasional.
		SIAP DORR (Sistem Aplikasi Donor Darah)	Sistem Aplikasi Donor Darah (SIAPDOOR) adalah aplikasi yang di



NO.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
			gunakan untuk menginput data pendonor, sebagai kartu donor darah digital yang bisa di lihat data pendonornya oleh masyarakat menggunakan handphone dan masyarakat juga dapat melihat stok darah di UTD yang di update setiap shift kerja.
3.	Kecamatan Jirak Jaya	MASS HYBRID (peMusnAhan Sampah Secara Hydro BuRner Incinerator Drum)	hydro burner incinerator drum (alat pembakar sampah) merupakan solusi terhadap permasalahan Pengelolaan sampah.
4.	Puskesmas Lais	MIKAK DIE (Melayani Konsultasi Tumbuh Kembang Gigi Anak Secara Daring dengan Hati dan Empati)	Melayani Konsultasi Tumbuh Kembang Gigi Anak Secara Daring dengan Hati dan Empati
		SEHARI SATU RAGA (Sehat Hari Ini Masa Tua Ceria Bahagia)	Untuk memberikan pelayanan kesehatan lansia sebaik mungkin agar kelompok usia ini bisa mencapai kesejahteraan, baik secara fisik maupun psikis dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor resiko PTM.



NO.	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
5.	Puskesmas Balai Agung	AYU TING TING	Ayo Curhat Keposyandu Cegah Stunting Itu Penting
		CIKINI KE BALAI AGUNG	Cek Skrining Tuberkulosis ke Balai Agung
		OSSIN (One Stop Service Immunization)	Pelayanan imunisasi Terpadu Satu Pintu
6.	Puskesmas Lumpatan	SULING MERDU	Telusur, Konseling, Pemeriksaan dan Edukasi HIV/AIDS dan IMS pada Remaja di Sekolah
7.	Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Baylen Keren LKD Kecamatan Bayung Lencir	Pemanfaatan Limbah Fiber Kelapa Sawit manjasi Wood Pelet di Pabrik Mini Berondolan Sawit Bumdesma Baylen Keren untuk Bahan Bakar Boiler.	Pemanfaatan Limbah Fiber Kelapa Sawit manjasi Wood Pelet di Pabrik Mini Berondolan Sawit Bumdesma Baylen Keren untuk Bahan Bakar Boiler.
8.	Desa Bero Jaya Timur Kecamatan Tungkal Jaya	Desa Digital	Konsep pengembangan desa yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat